



**LAPORAN SINGKAT**  
**KOMISI I DPR RI**

**KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN KEAMANAN LAUT RI, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT, DAN LEMBAGA SENSOR FILM (LSF)**

---

Rapat ke : 9 (sembilan)  
Tahun Sidang : 2015-2016  
Masa Persidangan : V  
Jenis Rapat : Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), dan Ketua Dewan Pers/ke-1  
Hari, Tanggal : Rabu, 8 Juni 2016  
Pukul : 10.00 WIB  
Sifat Rapat : Terbuka  
Pimpinan Rapat : Dr. TB. Hasanuddin, S.E., M.M.  
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.I.P., M.Si  
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1  
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270  
Acara : Penjelasan Menkominfo, Ketua KPI, Ketua KIP, dan Ketua Dewan Pers mengenai:  
1. RKA-KL dan RKP-KL T.A. 2017  
2. Pembahasan Usulan APBN-P T.A. 2016  
Hadir : 1. ... orang dari 51 Anggota Komisi I DPR RI  
2. Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara  
3. Ketua KPI Pusat, Dr. Judhariksawan  
4. Ketua KIP, Abdul Hamid Dipopramono  
5. Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo beserta jajaran.

**I. PENDAHULUAN**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 10.30 WIB dan dinyatakan Terbuka Untuk Umum.
2. Raker Komisi I DPR RI dengan Menkominfo dan RDP Komisi I DPR RI dengan Ketua KPI, Ketua KIP, dan Ketua Dewan Pers pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2016 dengan acara dan waktu

sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dr. TB. Hasanuddin, S.E., M.M.

## II. KESIMPULAN :

1. Komisi I DPR RI dapat menerima penjelasan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) terkait Pagu Indikatif Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kemkominfo Tahun Anggaran (T.A.) 2017 sebesar Rp5.087.000.000.000 (Lima Triliun Delapan Puluh Tujuh Miliar Rupiah), yang di dalamnya tercakup anggaran:
  - a. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat sebesar Rp48.863.900.000 (*Empat Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).
  - b. Dewan Pers sebesar Rp36.072.200.000 (*Tiga Puluh Enam Miliar Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
  - c. Komisi Informasi Pusat (KIP) sebesar Rp22.945.800.000 (*Dua Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).Selanjutnya, Komisi I DPR RI akan menyampaikan RKA dan RKP Kemkominfo T.A. 2017 tersebut di atas kepada Badan Anggaran DPR RI untuk dapat ditindaklanjuti.
2. Sehubungan dengan adanya Perubahan Pagu Anggaran Kemkominfo T.A. 2016 yang semula sebesar Rp5.184.971.488.000 (*Lima Triliun Seratus Delapan Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*) berubah menjadi Rp5.133.749.886.000 (*Lima Triliun Seratus Tiga Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*), Komisi I DPR RI dapat menyetujui perubahan tersebut. Selanjutnya akan diusulkan dalam APBN-P Kemkominfo T.A. 2016.
3. Komisi I DPR RI dapat menyetujui penjelasan Kemkominfo terkait dengan rencana pergeseran sumber dana dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Rupiah Murni sebesar Rp477.000.000.000 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Rupiah*), yang dialokasikan pada pagu anggaran Kemkominfo T.A. 2016. Selanjutnya akan diusulkan dalam APBN-P Kemkominfo T.A. 2016, dengan catatan agar program pemberdayaan masyarakat yang sudah ada pada anggaran sebelumnya tidak dikurangi.
4. Sehubungan dengan perencanaan program yang bersumber dari Anggaran Kemkominfo T.A. 2017, Komisi I DPR RI mendesak Mitra Kerja Komisi I DPR RI (Kemkominfo, KPI Pusat, KIP, dan Dewan Pers) untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Kemkominfo:
    - 1) Menggunakan anggaran dana *Universal Service Obligation (USO)* secara efisien, efektif, dan tepat sasaran, serta memaparkan setiap kegiatan dengan lengkap.
    - 2) Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung pelaksanaan tugas dan sistem pelaporan kegiatan.
    - 3) Bersinergi dengan LPP TVRI dan LPP RRI terkait dengan penggunaan anggaran APBN untuk penyanggahan iklan di media massa sehingga, kesinambungan kinerja LPP TVRI dan RRI tetap terjaga.
  - b. KPI Pusat dan KIP:

Menggunakan TIK untuk mendukung pelaksanaan tugas dan sistem pelaporan kegiatan.

c. Dewan Pers:

- 1) Menggunakan anggaran bertujuan untuk memperkuat pilar demokrasi keempat yakni pers.
- 2) Menggunakan TIK untuk mendukung pelaksanaan tugas dan sistem pelaporan kegiatan.

**III. PENUTUP**

Rapat diskors pukul 14.30 WIB.

Jakarta, 8 Juni 2016

**KETUA RAPAT,**

**TTD**

**Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.**

**A-165**